

Penyebab golput pada Pilkada tahun 2020

Sifahtullah Hamid, Al Rafni, Suryanef, Hasrul

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Al Rafni**

E-mail: alrafni@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya golput pada Pilkada 2020 di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Jenis Penelitian ini menggunakan mixed method dengan menggunakan model sequential yaitu sequential explanatory (kuantitatif-kualitatif) yang dimulai dengan penelitian kuantitatif untuk mendeskripsikan atau distribusi pemetaan tingkat penyebab golput masyarakat kemudian didukung dengan penelitian kualitatif melalui indept interview untuk memperkuat data yang diperoleh. Informan ditentukan melalui kombinasi teknik snowball sampling dan purposive sampling. Teknik pengumpulan data berupa angket, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data terdiri dari kuantitatif dengan menggunakan validitas dan realibilitas sedangkan uji kualitatif menggunakan metode triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator penyebab golput faktor psikologis termasuk dalam kategori rendah dengan persentase 44,41%. Masih rendahnya minat atau keterlibatan masyarakat dalam aktivitas politik serta rendahnya sosialisasi politik yang diperoleh oleh masyarakat. Indikator sistem politik termasuk kedalam kategori rendah 40,33%, dimana rendahnya penilaian masyarakat terhadap sistem politik/pemerintah. Indikator kepercayaan politik termasuk kedalam kategori rendah dengan persentase 41,88%, dimana rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap politik. Indikator sosial ekonomi juga termasuk kedalam kategori rendah dengan persentase 39,41%, dimana rendahnya penilaian masyarakat terhadap pilkada dengan melihat perjalanan politik yang menyebabkan kekecewaan terhadap kondisi nyata politik yang terjadi.

Kata Kunci: golput, Pilkada 2020, Pemilu

ABSTRACT

This study aims to determine the factors causing abstention in the 2020 Pilkada in Batang Anai District, Padang Pariaman Regency. This type of research uses a mixed method using a sequential model, namely sequential explanatory (quantitative-qualitative) which begins with quantitative research to describe or distribute mapping the level of causes of abstention in society, then supported by qualitative research through in-depth interviews to strengthen the data obtained. Informants are determined through a combination of snowball sampling and purposive sampling techniques. Data collection techniques include questionnaires, in-depth interviews and documentation studies. The data validity test consists of quantitative using validity and reliability while the qualitative test uses the source

triangulation method. The results of the study showed that the psychological factor indicator of abstention is included in the low category with a percentage of 44.41%. The low interest or involvement of the community in political activities and the low political socialization obtained by the community. The political system indicator is included in the low category of 40.33%, where the low public assessment of the political/government system. The political trust indicator is included in the low category with a percentage of 41.88%, where the low public trust in politics. The socio-economic indicator is also included in the low category with a percentage of 39.41%, where the low public assessment of the regional elections by looking at the political journey that causes disappointment with the real political conditions that occurred.

Keywords: golput, local election 2020, general election



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2024 by author.

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah merupakan bentuk nyata dari bentuk demokratisasi di daerah. Makna dari demokratis melalui ketentuan dengan memilih mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang”. (UU Nomor 6 Tahun 2020). Penelitian Dunggio (2021) menyatakan bahwa Pemilihan kepala daerah berarti memilih kepala daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yaitu gubernur di tingkat provinsi dan bupati/walikota di tingkat kabupaten kota. Pengisian jabatan kepala daerah di tingkat provinsi adalah sama dengan pengisian jabatan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota, yaitu dipilih secara langsung oleh rakyat. Penelitian Hemafitria (2021) menyatakan esensi utama dalam pilkada tidak sebatas hanya legitimasi untuk menentukan pemilihan kepala daerah dengan memberikan suara pada momen elektoral, tetapi dengan mengintervensi proses pendidikan politik bagi masyarakat yang bersifat langsung. Sesuai dengan pernyataan Fajri dan Montessori (2021) bahwa Pilkada merupakan instrument penting bagi demokratisasi di tingkat daerah atau lokal yang menjadi pilar bagi demokratisasi pada tingkat nasional.

Menurut Ristyawati (2020) Pilkada serentak maksudnya pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang sudah memenuhi syarat, yang juga dilaksanakan secara bersamaan di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Pilkada serentak 2020 ini merupakan pilkada dengan gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember pada tahun 2015. Pada Pilkada serentak 09 Desember 2020 terdapat sejumlah 270 daerah dengan rinciannya

adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu dari 224 kabupaten yang melaksanakan Pilkada. Pada pelaksanaan Pilkada 2020 di Padang Pariaman masih ada masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi politik dan memilih untuk golput. Menurut Rush dan Althoft dalam Arniti, (2020:333) partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum serta dalam dalam menentukan pemimpin pemerintahan.

Istilah golput muncul pada tahun 1970-an yang mengacu pada sikap serta tindakan untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu Orde Baru karena dinilai tidak demokratis yaitu dengan datang ke TPS tetapi menusuk lebih dari satu gambar atau menusuk bahagian putih dari kertas suara. Menurut Muhibin (Rahmad, 2014:3472) bahwa golongan putih dalam bahasa politik adalah suatu sikap yang diambil oleh individu-individu maupun kelompok untuk tidak ikut dalam berpartisipasi pada pemilihan. Menurut Milbrath & Goel dalam penelitian Al Rafni dan Aina (2016), golput yaitu orang yang tidak berminat atau tidak mempunyai perhatian terhadap orang lain, situasi maupun gejala-gejala politik. Berdasarkan data rekapitulasi yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman, pemilih yang golput dalam Pilkada 2020 tersebar di 17 Kecamatan, salah satunya di Kecamatan Batang Anai. Dimana pada tahun 2010 angka golput di Kecamatan Batang Anai yaitu 43,6% dari 27.781 pemilih yang terdaftar di DPT, pada putaran ke-2 mengalami peningkatan yaitu 56,2% dari 27.781 pemilih di DPT. Sedangkan pada Tahun 2015 mengalami penurunan yaitu 55,9% dari 29.396 pemilih yang terdaftar.

Namun pada Pilkada Tahun 2020 Kecamatan Batang Anai ini juga merupakan kecamatan tertinggi persentase golput dari 16 kecamatan lainnya. Hal ini terlihat dari data rekapitulasi oleh KPUD, terdapat sekitar 19.350 pemilih atau 54,9% pemilih yang golput dari total DPT sebesar 35.237 pemilih. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan warga negara yang berpartisipasi menggunakan hak pilihnya hanya berjumlah 15.887 pemilih atau sekitar 45%. Maka berdasarkan data tersebut, jumlah pemilih yang golput di Kecamatan Batang Anai sangat tinggi. David Moon (dalam Aina, 2013) terdapat dua pendekatan dalam menjelaskan ketidakhadiran pemilih (non-voting) dalam pemilu. *Pertama*, menekankan kepada karakter sosial dan psikologi pemilih serta karakteristik institusional sistem pemilu. *Kedua*, menekankan pada harapan dari pemilih terkait untung maupun rugi berdasarkan keputusan dari mereka ambil untuk hadir atau tidak saat pemilihan. Berdasarkan dari kedua pendekatan tersebut, terdapat empat faktor yang mempengaruhi seseorang berperilaku tidak memilih yaitu faktor psikologis, sistem politik, kepercayaan politik, dan latar belakang sosial ekonomi.

METODE PENELITIAN

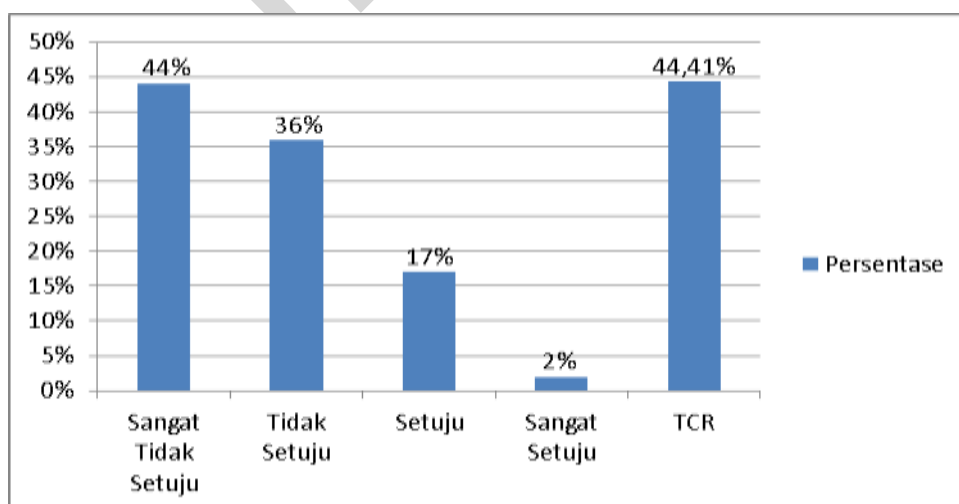
Jenis penelitian yang digunakan adalah *Mixed Method* atau penelitian Campuran. Penelitian Campuran menurut Aramo-immonen (Ismail, 2022) adalah bentuk pendekatan dalam penelitian yang menggabungkan bentuk kuantitatif dan kualitatif dalam satu rangkaian penelitian, dimana metode ini memberikan peneliti pada seluruh disiplin penelitian keluasan dalam memahami masalah penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan model sequential yaitu sequential explanatory (kuantitatif-kualitatif) yang dimulai dengan penelitian kuantitatif untuk mendeskripsikan atau distribusi pemetaan tingkat penyebab golput masyarakat di Kecamatan Batang anai kemudian didukung dengan penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam untuk memperkuat data yang diperoleh. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah angket, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Uji Keabsahan data dalam penelitian ini ada dua yaitu kuantitatif berupa uji instrument penelitian, uji validitas dan uji realibitas sedangkan dalam bentuk kualitatifnya berupa triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab terjadinya golput pada Pilkada 2020 di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman

a. Faktor Psikologis

Faktor psikologis merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang berperilaku tidak memilih pada saat Pilkada Tahun 2020. Berdasarkan penelitian, penulis menyatakan masyarakat yang golput (tidak memilih) pada Pilkada Tahun 2020 yang menjadi responden sebanyak 100 orang. Berikut data yang diperoleh terkait dengan penyebab golput dari faktor psikologis dapat dilihat sebagai berikut:



Grafik 1. Persentase Penyebab Golput dari Faktor Psikologis

Sumber: Olahan peneliti

Berdasarkan dari grafik di atas dengan 9 item pernyataan mengenai penyebab golput dari faktor psikologis, terlihat pada persentase yang tinggi menunjukkan pilihan terbanyak dari masyarakat yang menjawab 44% sangat tidak setuju. Masyarakat golput disebabkan karena tidak acuhnya masyarakat dan tidak adanya minat sama sekali terhadap aktivitas politik yang mempengaruhi masyarakat menarik diri dari persoalan politik, yang terlihat dari tidak adanya antusias pada keikutsertaan dalam pemilihan dan tidak tertariknya masyarakat mengenai Pilkada 2020. Hal ini juga disebabkan karena tidak adanya sosialisasi ataupun rangsangan politik dari kandidat yang diperoleh oleh masyarakat, sehingga masyarakat juga sama sekali tidak mengetahui calon kandidat serta tentang visi misi ataupun program dari kandidat itu sendiri. Dan masyarakat sama sekali tidak yakin Pilkada 2020 akan membawa perubahan atau hasil secara langsung.

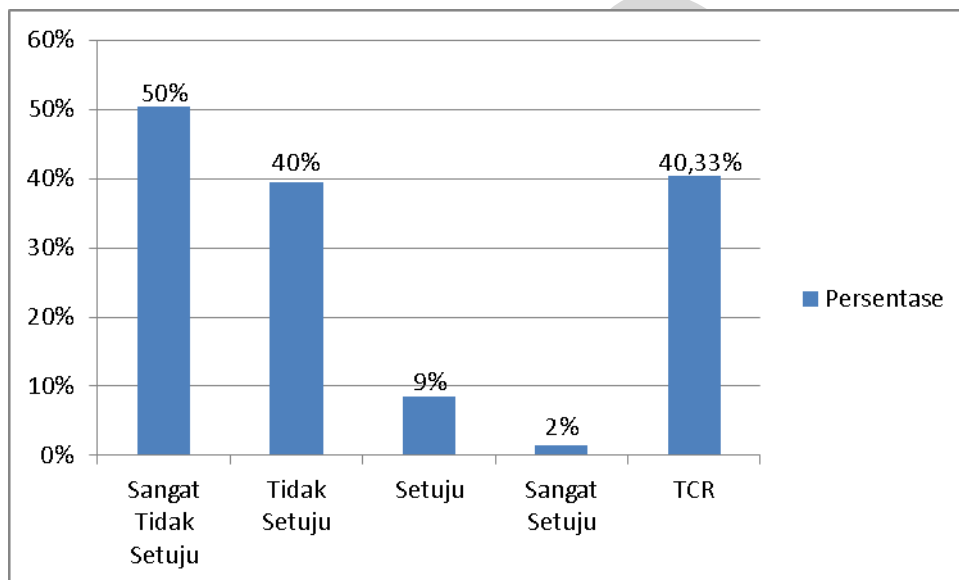
Hal ini didukung oleh hasil wawancara informan yang mengatakan bahwa mereka memilih untuk golput disebabkan oleh sikap acuh tak acuh terhadap aktivitas politik, dimana mereka menganggap Pilkada itu tidak penting dan apapun yang diperjuangkan oleh kandidat tidak akan mempengaruhi kepentingan pribadi. Kemudian tidak kenalinya mereka terhadap kandidat yang juga mempengaruhi mereka tidak memilih. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Ory selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu yang mengatakan bahwa faktor penyebab masyarakat tidak memilih diakibatkan oleh masyarakat tidak mengetahui atau tidak kenal dengan kandidat. Hal ini yang membuat masyarakat tidak mau berpartisipasi saat Pilkada 2020. Padahal Ketua KPU Tahun 2020 oleh Bapak Zulnaldi, mengatakan bahwa pihak KPU sudah mensosialisasikan mengenai Pilkada 2020 kepada masyarakat dan itu sudah dilaksanakan sepenuhnya.

Dilihat dari faktor psikologis pemilih, menunjukkan bahwa informan memiliki ciri kepribadian yang acuh tak acuh serta tidak adanya minat terhadap pilkada. Mereka menarik diri dari aktivitas politik dan merasa kegiatan tersebut tidak bermanfaat serta tidak menguntungkan bagi dirinya. Hal ini juga disebabkan kurangnya rangsangan politik yang diperoleh oleh masyarakat sehingga mereka menjadi lengah terhadap aktivitas politik. Setelah itu disebabkan oleh faktor tidak kenalinya masyarakat dengan kandidat disebabkan oleh kurangnya informasi yang masyarakat dapatkan sehingga juga mempengaruhi mereka dalam ikut serta saat pilkada. Hasil penelitian dari faktor psikologis tersebut juga berkaitan dengan pendapat Sherman dan Kolker, yang mengatakan bahwa pemilih yang golput tersebut disebabkan oleh orientasi kepribadian pemilih yang memiliki ciri apatis, anomi, dan aliensi. Secara teoritisnya perasaan apatis tersebut disebabkan karena tidak adanya minat terhadap persoalan politik. Hal tersebut juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi

atapun rangsangan politik serta adanya perasaan bahwa aktivitas politik tersebut tidak membawa rasa kepuasan secara langsung yang dirasakan oleh pemilih. Anomi juga menunjukkan rasa tidak berguna. Mereka melihat pelaksanaan politik tersebut hanyalah sia-sia yang kenyataannya tidak berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Dengan melihat faktor psikologis dari pemilih tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemilih memiliki sikap apatis, acuh serta tidak adanya minat terhadap aktivitas politik, dan merasa aktivitas tersebut tidak penting karena tidak memberikan rasa kepuasan secara langsung serta juga dipengaruhi oleh tidak kenalnya masyarakat dengan kandidat dimana mereka tidak adanya sosialisasi yang diberikan hal ini juga mempengaruhi mereka untuk tidak memilih.

b. Faktor Sistem Politik

Berikut data yang diperoleh terkait dengan penyebab golput dari faktor sistem politik dapat dilihat sebagai berikut:



Grafik 2. Persentase Penyebab Golput dari Faktor Sistem Politik

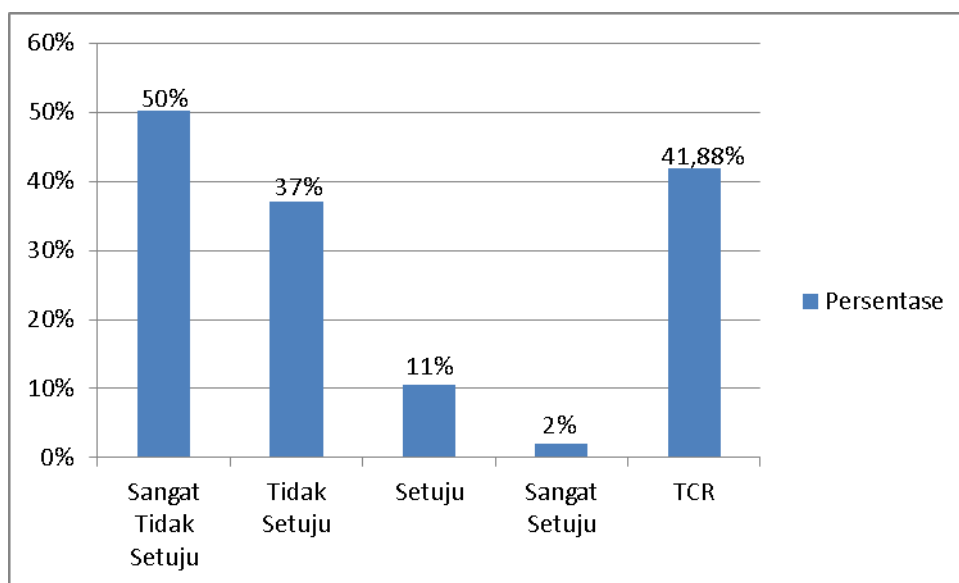
Sumber: Olahan peneliti

Berdasarkan dari grafik di atas dengan 9 item pernyataan dari penyebab golput faktor sistem politik terlihat persentase tertinggi diperoleh pada 50% dengan kategori sangat tidak setuju. Hal ini terlihat bahwa penyebab golput dari faktor sistem politik disebabkan karena masyarakat tidak percaya sama sekali terhadap kinerja sistem politik termasuk pemerintah yang tidak menguntungkan bagi kesejahteraan masyarakat. Masyarakat sangat tidak percaya bahwa kandidat yang mencalon saat itu terbaik dalam memimpin daerah untuk kedepannya. Masyarakat juga tidak percaya sama sekali dengan proses atau hasil pemilu yang masih ditemui kecurangan dari hasil pemilu sebelumnya yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap sistem politik yang membuat masyarakat tidak mau menggunakan hak suara dalam pilkada.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara kepada informan yang menyatakan bahwa mereka tidak memilih karena melihat dari kinerja pemerintah sebelumnya tidak ada perubahannya. Masyarakat tidak percaya sama sekali serta buruknya penilaian mereka terhadap pemerintahan. Kekecewaan yang mereka rasakan terhadap kinerja sistem politik/pemerintahan membuat berakhirnya pada tindakan untuk tidak memilih. Hal lain juga disebabkan ketidakpercayaan dengan kandidat yang mencalon karena dirasa tidak bisa membawa perubahan sesuai dengan kondisi riil dari yang mereka rasakan.

c. Faktor Kepercayaan Politik

Berikut data yang diperoleh terkait dengan penyebab golput dari faktor kepercayaan politik dapat dilihat sebagai berikut:



Grafik 3. Persentase Penyebab Golput dari Faktor Kepercayaan Politik
Sumber: Olahan peneliti

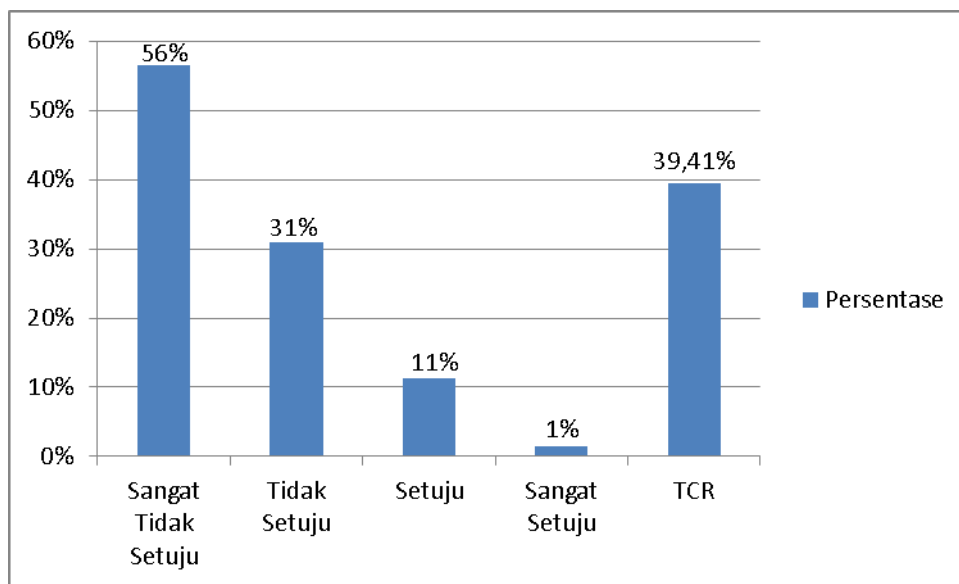
Faktor kepercayaan politik menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat tidak ikut memilih dalam Pilkada. Berdasarkan dari grafik diatas dengan 9 item pernyataan penyebab golput dari faktor kepercayaan politik terlihat dengan persentase tertinggi adalah sangat tidak setuju dengan perolehan hasil 50%. Penyebab masyarakat tidak memilih karena masyarakat tidak percaya sama sekali dengan politik, masyarakat tidak percaya sama sekali dengan kinerja pemerintah. Kemudian ketidakpercayaan sama sekali masyarakat kepada kandidat yang akan menjalankan programnya jika mereka terpilih, dan ketidakpercayaan kepada kandidat yang mencalon yang akan membawa perubahan yang lebih untuk kedepannya. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan informan yang tidak percaya sama sekali dengan politik seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap calon kandidat dan tidak percaya sama sekali pada pilkada yang akan membawa perubahan dalam kehidupan. Masyarakat lebih memilih melakukan kegiatan lain yang bermanfaat daripada datang ke TPS.

Menurut informan di atas terlihat alasan mereka golput disebabkan oleh tidak percaya terhadap politik dan adanya anggapan bahwa Pilkada merupakan ajang untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan memberikan iming-iming guna memperoleh dukungan. Dengan demikian membuat kepercayaan masyarakat menjadi buruk terhadap politik. Menurut Syahrul Hidayat dari Divisi Data dan Informan mengatakan bahwa *waktu* Pilkada Tahun 2020 pihak PPK Kecamatan sendiri sudah melaksanakan tugas dengan baik untuk mempersiapkan pilkada tersebut. Tetapi dari masyarakat sendiri memang banyak yang golput dengan alasan politik. Mereka beranggapan kalau politik itu hanya berkaitan dengan uang dan cuman menguntungkan dirinya sendiri. Masyarakat beranggapan kalau pelaksanaan pilkada itu tidak ada membawa perubahan bagi kehidupan mereka. Mereka menilai kalau pemerintah yang menjabat sebelumnya tidak ada memberikan pengaruh bagi mereka. Dengan kondisi seperti itu menyebabkan masyarakat tidak mau menggunakan hak pilihnya saat Pilkada 2020.

Kepercayaan masyarakat terhadap politik merupakan hal yang sangat mempengaruhi tingginya angka ketidakhadiran masyarakat dalam Pilkada. Tingkat kepercayaan politik informan tersebut sangat rendah juga dikarenakan tidak percaya lagi kepada pemerintah karena tidak dapat dipercaya sama sekali dan visi misinya hanyalah omong kosong belaka yang tidak pernah dibuktikan. Mereka menilai sebelum dilaksanakan pemilihan mereka diberikan janji manis supaya mereka tertarik dan memilih kandidat tersebut. Dengan melihat situasi tersebut, mereka menilai itu hanyalah omong kosong belaka yang nantinya jika mereka terpilih menduduki kursi pemerintahan pasti mereka lupa akan janjinya. Dengan pandangan tersebut membuat mereka menjadi tidak percaya pada politik, dan hal tersebut yang membuat masyarakat memutuskan untuk golput.

d. Faktor Sosial Ekonomi

Berikut data yang diperoleh terkait dengan penyebab golput dari faktor sosial ekonomi dapat dilihat sebagai berikut



Grafik 4. Persentase Penyebab Golput dari Faktor Sosial Ekonomi
Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan dari grafik di atas dengan 9 item pernyataan dari penyebab golput faktor sosial ekonomi terlihat persentase tertinggi diperoleh pada 56% dengan kategori sangat tidak setuju. Faktor sosial ekonomi menjadi alasan seseorang untuk tidak ikut memilih saat pilkada. Faktor sosial ekonomi berkaitan dengan keadaan sosial seperti pendidikan dan faktor ekonomi yang berkaitan dengan golongan mobilitas menengah ke atas atau berkaitan dengan pekerjaan maupun pendapatan. Penyebab masyarakat tidak memilih dikarenakan masyarakat sangat tidak percaya dengan pilkada dengan menilai bagaimana roda perjalanan politik pilkada selama ini yang membuat masyarakat sangat tidak yakin bahwa pilkada bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Masyarakat sangat tidak yakin kandidat yang mencalon akan menjalankan program yang sudah dibuat apabila mereka sudah terpilih. Masyarakat tidak bisa memilih dipengaruhi oleh keadaan masyarakat yang tidak bisa meluangkan waktunya untuk memilih dengan alasan sedang bekerja, dan mereka sangat tidak yakin bahwa aktivitas politik pilkada akan mempengaruhi perekonomian masyarakat.

Adapun hasil wawancara berkaitan dengan pendidikan, pendapatan dan pekerjaan pemilih dimana dari informan yang memiliki latar belakang sosial yang tinggi memilih untuk golput saat pilkada karena mereka melihat dari pengalaman perjalanan politik yang banyak hanyalah omong kosong belaka. Saat kampanye kandidat memberikan adanya iming-iming misalnya masyarakat diberikan bantuan ataupun mendapatkan pekerjaan bagi yang memilihnya. Tetapi saat mereka terpilih tidak adanya bukti dari apa yang disampaikan saat kampanye hanya kekecewaan yang didapat oleh masyarakat. Saat kampanye pun kandidat juga mengumbar janji

supaya memilih dia, tapi saat terpilih mereka melupakan janjinya. Jadi masyarakat merasa kecewa dan malas untuk ikut mencoblos.

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki tingkat status sosial ekonomi tinggi juga menjadi alasan seseorang memilih untuk golput. Masyarakat berpendidikan tinggi memiliki alasan yang kuat untuk tidak berpartisipasi karena mereka semakin kritis serta rasional terhadap masalah politik serta ketidakpercayaannya dengan kinerja pemerintah. Berkaitan dengan status sosial ekonomi yang berkaitan dengan pekerjaan juga merupakan faktor krusial yang mempengaruhi seseorang untuk golput. Hal tersebut berdasarkan dari wawancara dilihat tingkat sosial ekonomi rendah, masyarakat lebih mementingkan finansialnya yang menghasilkan sesuatu yang pasti dan menguntungkan bagi mereka. Masyarakat lebih mengutamakan mencari penghasilan daripada ikut memilih saat pilkada.

Para informan mengaku lebih mengutamakan bekerja daripada ke TPS, ia menganggap hal tersebut hanya membuang waktu dan sia-sia sehingga lebih memilih untuk bekerja. Menurutnya bekerja merupakan hal yang lebih utama dan menguntungkan bagi dirinya daripada memilih yang dirasa tidak membawa keberuntungan bagi kehidupannya. Beberapa informan yang terdiri dari pedagang lebih memilih berdagang di pasar daripada harus datang mencoblos.

Dari faktor sosial ekonomi ini berkaitan dengan tingkat pendidikan, pendapatan dan pekerjaan. Status sosial ekonomi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk melakukan kegiatan termasuk berkaitan dengan kegiatan politik. Dengan status sosial ekonomi yang tinggi seseorang mampu termotivasi untuk menggunakan hak pilihnya. Namun, berdasarkan dari hasil temuan bahwa beberapa pemilih yang golput berada pada tingkat pendidikan tinggi serta ekonomi tinggi. Mereka lebih memilih untuk golput karena melihat dari realitas yang ada bagaimana mereka menilai kinerja dari pemerintah yang tidak membawa perubahan. Hal tersebut membuat masyarakat memilih untuk golput disebabkan oleh buruknya kinerja dari pemerintah. Hal tersebut senada disampaikan oleh Wolfinger bahwa pada tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan besar dalam mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut, disamping memungkinkan seseorang menguasai aspek birokrasi, baik saat pendaftaran maupun saat pemilihan. Hal tersebut senada dengan hasil temuan penelitian berdasarkan dari tingkat sosial ekonomi tinggi, dimana mereka memiliki alasan yang kuat untuk tidak memilih karena kekritisannya dalam memahami bagaimana kinerja dari pemerintah selama ini dan dirasa tidak ada hasil yang memuaskan secara langsung diperoleh oleh masyarakat.

Dari tingkatan sosial ekonomi rendah, juga menjadi alasan seseorang untuk tidak menggunakan hak pilihnya, hal tersebut dilihat berdasarkan dari hasil temuan wawancara dengan informan, bahwa

mereka lebih memfokuskan ke pekerjaannya daripada memilih. Hal tersebut disebabkan mereka merasa kegunaan dari memilih itu sendiri tidak akan mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga mereka lebih mengutamakan untuk berkerja yang dirasa menghasilkan sesuatu hal yang pasti dan menguntungkan daripada ikut berpartisipasi dalam pilkada.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor yang pertama faktor psikologis dimana masyarakat acuh tak acuh dan tidak adanya minat atas aktivitas politik. Mereka merasa kegiatan tersebut tidak penting karena tidak menyebabkan rasa puas secara langsung dan masyarakat tidak kenal dengan kandidat karena kurangnya sosialisasi secara langsung di lapangan. Faktor lain yaitu sistem politik dimana masyarakat merasa kecewa terhadap sistem politik dan pemerintahan yang mereka rasakan dengan melihat dari kondisi nyata. Kekecewaan tersebut mengakibatkan masyarakat untuk memilih golput pada Pilkada, karena persepsi yang mereka berikan terhadap politik yang berakhir dengan tindakan tidak memilih.

Faktor berikutnya yaitu kepercayaan politik dimana masyarakat sangat tidak percaya dengan politik dengan melihat kondisi riil yang dirasakan. Masyarakat menganggap politik itu kotor, berkaitan dengan politik uang atau *money politic* yang membuat mereka merasa pemilihan tersebut tidak bersih. Mereka tidak percaya pada pemerintah yang tidak ada membawa perubahan dalam kehidupan, hanyalah janji-janji yang diberikan sebelum pemilihan. Faktor keempat, sosial ekonomi dimana faktor yang paling dominan masyarakat untuk golput. Hal ini disebabkan walaupun pendidikan masyarakat tinggi tidak menutup kemungkinan mereka berpartisipasi politik. Hal tersebut terjadi karena mereka yang berpendidikan dan ekonomi tinggi juga memilih untuk golput karena mereka memiliki kekritisian yang tinggi menilai kinerja pemerintah sehingga mereka memilih untuk golput. Bagi masyarakat yang sosial ekonomi rendah juga menyebabkan mereka untuk golput, karena mereka lebih fokus ke pekerjaannya yang dirasa lebih penting daripada memilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Aina. 2013. Perilaku Non-Voting Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Periode 2008-2013 (Studi Kasus di Kecamatan Kota Tengah). *Humanus* Vol. XII No. 1 2013.
- Dunggio, Swastiani, Iskandar, N, Yantu. 2021. Studi Kasus Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, Vol 3 No 2 2021.

- Hemafitria, dkk. 2021. Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Desa Perapakan Kabupaten Sambas. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 2 No 1 2021.
- Joni, Syafri Fajri, Maria Montessori. 2021. Modal Sosial Pasangan Mahyeldi-Audy Dalam Kompetisi Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020. *Jurnal of Civic Education*. Vol 4 No 3 2021.
- Ketut, Ni Arniti. 2020. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Vol. 4 No. 2 2020.
- Pane, Ismail,dkk. 2022. *Desain Penelitian Mixed Method*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI
- Rafni, Al, Aina. 2016. Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Melalui Partai Politik. *Jurnal Analisis Politik* Vol. 1 No. 2 2016.
- Rinjani, Rahmad. 2014. Studi Tentang Golongan Putih dalam Pilkada Gubernur Kaltim 2013 Di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kertanegara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* .Vol. 2 No. 4 2014.
- Ristyawati, Aprista. 2020. Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Crepido*. Vol 2 No 2 2020.